

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Realisasi Duet PT KAI-MRT Dinanti di 2020

Kolaborasi PT Kai dan PT MRT Jakarta menargetkan mulai mengelola integrasi antarmoda pada awal 2020. Fokus pertama menata stasiun, yaitu Tanah Abang dan Pasar Senen.

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia dan PT MRT Jakarta akan membentuk perusahaan bersama pada awal tahun 2020 untuk mengelola transportasi antarmoda terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga jumlah pengguna transportasi umum kian meningkat.

Kesepakatan Head of Agreement (HoA) Pembentukan Perusahaan dalam Rangka Integrasi Transportasi Jabodetabek ditandatangani pada Senin (9/12/2019) pagi di Balai Kota DKI Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.

Perusahaan bersama itu memiliki tugas menata kawasan stasiun, melakukan studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan membuat perencanaan pengembangan kawasan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*) sehingga mendorong peralihan moda transportasi publik.

Dengan kelembagaan yang terintegrasi, nanti akan ada integrasi dari rute, termasuk infrastruktur, sistem tiket, sistem pembayaran, hingga kelembagaan. Untuk pengelolaan kawasan stasiun, akan diawali terlebih dulu di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

"Harapannya, dua sampai tiga tahun ke depan, banyak warga Jakarta yang semakin tertarik tinggal di sekitar daerah-daerah akses ke transportasi umum, khususnya MRT, KAI, dan yang lain. Jadi, kon-

sepnya seperti di Jepang dan di Belanda, masyarakat *ngumpul*-nya justru di titik-titik transportasi umum," ujar Kartika.

Kartika menyampaikan, pembentukan perusahaan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan moda transportasi Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas. Pemerintah Provinsi DKI, lanjut Kartika, akan memiliki kontrol pada struktur kepemilikan perusahaan tersebut.

Sebagai catatan, mayoritas kepemilikan saham dimiliki PT MRT Jakarta sebesar 51 persen, sedangkan PT KAI 49 persen. Hingga saat ini, nama perusahaan belum ditentukan. "Masih punya satu bulan untuk menentukan nama. Satu bulan *inject* (injeksi) modal. Setelah itu, langsung bikin kajian mengenai kerja sama TOD," ujar Kartika.

Anies meyakini, integrasi secara rute, pengelolaan, dan tiket ini kelak dapat meningkatkan jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta. Sebab, transportasi publik yang efisien paling dicari oleh masyarakat. "Ini awal angkutan kereta api dengan angkutan darat yang ada di Jakarta akan terintegrasikan. Artinya, jutaan penduduk Jakarta akan bisa berpindah dari satu moda ke moda yang lain leluasa (dan) mudah," ucap Anies.

Saat ini pengguna KRL Jabodetabek sekitar 1,2 juta orang per hari dan pengguna kendaraan angkutan darat sekitar 980.000 orang per hari.

Paruh kedua tahun depan

William menjelaskan, perusahaan gabungan PT MRT dan PT KAI mulai beroperasi pada awal 2020. Hasil konkret kolaborasi ini ditargetkan muncul pada kuartal III dan

kuartal IV-2020. "Kerjanya mesti cepat. Jadi, proses interkoneksi antartransportasi publik, khususnya yang berbasis kereta, berjalan aman dan nyaman," kata William.

Namun, lanjut William, integrasi sistem pembayaran tak bisa cepat dilakukan. Dia berharap integrasi sistem pembayaran dengan seluruh moda transportasi di DKI bisa mulai pada 2022. Hal ini seiring target Bank Indonesia, satu kartu bisa terintegrasi untuk seluruh moda transportasi di DKI selambatnya Januari 2022.

Edi Sukmoro menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan armada yang cukup saat pengintegrasian mulai berjalan. "Artinya, kalau kami siapkan armadanya lebih-lebih, mereka tak perlu lagi bawa mobil atau motor," ucapnya.

Babak baru

Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Heru Wisnu Wibowo dalam forum diskusi yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta mengatakan selama ini urusan di stasiun adalah urusan stasiun. Di luar stasiun adalah urusan pemerintah daerah. Dengan adanya entitas usaha baru ini, stasiun-stasiun dikelola bersama antara DKI dan PT KAI.

Syafrin menambahkan, setelah kerja sama PT KAI-MRT, yang juga mendasak adalah mengintegrasikan secara utuh antara moda transportasi berbasis rel dan yang berbasis jalan. Integrasi KRL-MRT dengan jaringan bus Transjakarta, JakLingko, atau angkutan daring perlu segera ditata. Hal senada ditegaskan Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata. (BOW/HLN)